

Efektivitas Strategi Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o Kabupaten Nias

Suci R. Sirait^{1*} Amrul N. Sitompul² Denny Ramdhanny³

¹Mahasiswa Prodi Administrasi Negara, FISIP Universitas Jayabaya

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o, hambatan yang dihadapi, upaya optimalisasi, serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan Teori Efektivitas Steers sebagai landasan analisis yang didukung oleh konsep *good governance*, desentralisasi, dan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias telah menerapkan berbagai strategi, seperti peningkatan kompetensi dan pengawasan guru, pembangunan sarana dan prasarana, penyediaan rumah dinas guru, serta penguatan tata kelola pendidikan. Strategi tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran, motivasi belajar siswa, dan tata kelola sekolah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur, akses menuju sekolah, serta distribusi tenaga pendidik dan bahan pembelajaran yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pemerataan fasilitas pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru agar peningkatan mutu pendidikan dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas, strategi pemerintah daerah, mutu pendidikan.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the Nias Regency Government's strategies in improving the quality of education at SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o, as well as the challenges faced, optimization efforts, and the impact on the quality of learning. The study employs a descriptive-qualitative method based on a literature review, utilizing Steers' Effectiveness Theory as the analytical framework, supported by concepts of good governance, decentralization, and regional autonomy. The results indicate that the Nias Regency Government has implemented various strategies, such as enhancing teacher competence and supervision, developing facilities and infrastructure, providing teacher housing, and strengthening educational governance. These strategies have positively impacted the quality of the learning process, student learning motivation, and school governance. However, implementation still faces obstacles, including challenging geographical conditions, limited infrastructure, accessibility issues, and suboptimal distribution of educators and learning materials. Therefore, there is a need to strengthen coordination among stakeholders, ensure the equitable distribution of educational facilities, and improve teacher welfare and competence to ensure that the enhancement of educational quality proceeds optimally and sustainably.

Keywords: Effectiveness, local government strategy, education quality

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Kualitas ilmu pengetahuan, teknologi, daya saing, dan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh mutu sistem pendidikan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, serta penumbuhan kemampuan berpikir

kritis dan kreatif. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Dalam konteks tersebut, pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan menjadi bagian penting dari pembangunan nasional sebagaimana dijamin dalam Pasal 31

UUD Tahun 1945.

Tuntutan terhadap mutu pendidikan semakin meningkat seiring perkembangan globalisasi dan teknologi. Pendidikan dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, keterampilan abad ke-21, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, serta karakter yang kuat. Menurut Mulyasa (2023), mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai komponen yang saling berkaitan, antara lain kualitas pendidik, kepemimpinan kepala sekolah, kurikulum, sarana dan prasarana, budaya sekolah, partisipasi masyarakat, serta efektivitas manajemen pendidikan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan pendidikan dasar menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Karena itu, efektivitas strategi pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana, mengelola tenaga pendidik, mengalokasikan anggaran, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan mutu layanan pendidikan.

Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah masih menjadi persoalan. Daerah terpencil dan kepulauan menghadapi tantangan yang lebih kompleks berupa keterbatasan infrastruktur, akses transportasi, fasilitas pembelajaran, distribusi guru, dan sumber belajar. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, yang memiliki karakteristik geografis berupa daerah perbukitan dan desa-desa terpencil dengan akses transportasi yang belum sepenuhnya memadai. Kerusakan jalan dan jembatan menuju sekolah tidak hanya menghambat mobilitas guru dan peserta didik, tetapi juga memengaruhi distribusi bahan ajar dan sarana pendidikan. Akibatnya, proses pembelajaran berpotensi tidak berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Persoalan tersebut salah satunya tergambar pada SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o, Kabupaten Nias. Sekolah ini sempat menjadi perhatian masyarakat setelah beredarnya informasi melalui media sosial mengenai ketidakhadiran guru dalam kurun waktu tertentu yang dikaitkan dengan kondisi geografis, keterbatasan akses, dan minimnya fasilitas pendukung. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di wilayah terpencil tidak hanya menyangkut proses pembelajaran, tetapi juga berkaitan dengan infrastruktur, pemerataan pelayanan publik, distribusi dan

kehadiran tenaga pendidik, serta efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan dan jembatan yang kurang memadai, serta keterbatasan sarana pembelajaran menjadi faktor yang dapat memengaruhi kualitas layanan pendidikan kepada peserta didik.

Sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat telah melaksanakan berbagai program perbaikan, antara lain pembangunan rumah dinas guru, rehabilitasi gedung sekolah, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penyediaan fasilitas pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Pembangunan rumah dinas guru menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi hambatan jarak tempuh dan mendukung peningkatan kehadiran guru di sekolah terpencil. Namun, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah program yang telah dilaksanakan, melainkan harus dilihat dari dampaknya terhadap sekolah, guru, peserta didik, dan masyarakat. Dalam implementasinya, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan tenaga pendidik, koordinasi antarinstansi, serta pengawasan program yang belum optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o relevan dijadikan lokasi penelitian karena merepresentasikan berbagai tantangan sekaligus upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah kepulauan. Penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis efektivitas strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta mengkaji upaya optimalisasi yang telah dilakukan. Secara teoretis, penelitian diharapkan memperkaya kajian mengenai manajemen pemerintahan di bidang pendidikan, khususnya dalam konteks wilayah terpencil dan kepulauan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Nias, Dinas Pendidikan, sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nias.

Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu administrasi dan manajemen yang

digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila mampu melaksanakan program kerja secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sehingga menghasilkan keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang sesuai dengan sasaran. Dalam konteks pemerintahan, efektivitas menjadi salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan publik, termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Penilaian efektivitas tidak hanya didasarkan pada hasil akhir, tetapi juga mencakup proses pelaksanaan, pemanfaatan sumber daya, serta kemampuan organisasi dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul selama program berlangsung.

Menurut Richard M. Steers, efektivitas organisasi menunjukkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan terarah. Steers mengidentifikasi tiga faktor utama yang memengaruhi efektivitas organisasi, yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, dan karakteristik individu. Karakteristik organisasi mencakup struktur organisasi, sistem administrasi, kepemimpinan, dan mekanisme koordinasi. Karakteristik lingkungan meliputi kondisi eksternal, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan geografis yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Adapun karakteristik individu berkaitan dengan kompetensi, motivasi, disiplin, dan komitmen sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama menentukan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dalam penelitian ini, teori efektivitas Steers digunakan sebagai landasan untuk menganalisis keberhasilan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o. Efektivitas strategi tersebut dapat dilihat dari sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu mengatasi berbagai persoalan pendidikan yang dihadapi sekolah, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya akses menuju sekolah, distribusi tenaga pendidik, peningkatan kehadiran guru, serta peningkatan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Dengan demikian, teori efektivitas menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah strategi pemerintah daerah yang telah dilaksanakan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan dalam peningkatan mutu pendidikan.

Pandangan Steers sejalan dengan Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske (2012) yang memandang efektivitas organisasi sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui koordinasi kerja yang baik dan pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi secara optimal. Sejalan dengan itu, Mahmudi (2015) menjelaskan bahwa efektivitas dalam sektor publik merupakan ukuran keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan suatu program, semakin tinggi pula tingkat efektivitas kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, keberhasilan strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat dinilai berdasarkan sejauh mana sasaran program pendidikan daerah tercapai, baik dari aspek pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan sumber daya, maupun perubahan yang dihasilkan terhadap kondisi pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o.

Konsep *Good Governance*

Selain teori efektivitas, penelitian ini menggunakan konsep *good governance* sebagai landasan teoritis untuk menganalisis tata kelola pemerintahan di bidang pendidikan. *Good governance* merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, partisipasi masyarakat, dan responsivitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Konsep tersebut berkembang sebagai pendekatan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, profesional, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil. Dalam sektor pendidikan, penerapan prinsip *good governance* menjadi penting karena pendidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.

Kebijakan pendidikan yang diselenggarakan berdasarkan prinsip *good governance* diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah daerah tidak hanya berkewajiban merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan secara efektif melalui mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Tata kelola pemerintahan yang baik pada akhirnya dapat mendukung pelaksanaan berbagai program peningkatan mutu pendidikan karena melibatkan dan memperoleh dukungan

dari seluruh pemangku kepentingan.

Saputri et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan *good governance* dalam kebijakan publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Sejalan dengan hal tersebut, Wulandari et al. (2025) menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* dalam sektor pendidikan berperan penting dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Dengan demikian, *good governance* menjadi salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Konsep Desentralisasi

Kerangka teori penelitian ini juga didukung oleh konsep desentralisasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam bidang pendidikan, desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan dasar berdasarkan karakteristik wilayah, termasuk pengelolaan tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, pengalokasian anggaran, serta penyusunan program peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemerataan pendidikan karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih dekat terhadap kondisi riil dan kebutuhan masyarakat dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Fitriani et al. (2025) menyatakan bahwa desentralisasi pendidikan memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan sekolah. Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya setempat. Namun, efektivitas desentralisasi sangat ditentukan oleh kapasitas manajerial pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya

pendidikan secara profesional. Daerah yang memiliki kapasitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan yang baik cenderung lebih mampu meningkatkan mutu pendidikan dibandingkan dengan daerah yang kapasitas kelembagaannya masih terbatas.

Pandangan tersebut sejalan dengan Aini (2022) yang menjelaskan bahwa desentralisasi membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan inovasi pendidikan berbasis potensi lokal. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat merancang dan melaksanakan program pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Meskipun demikian, pelaksanaan desentralisasi tetap memerlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah munculnya kesenjangan mutu pendidikan antardaerah. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap diperlukan agar penyelenggaraan kebijakan pendidikan berlangsung secara harmonis, sekaligus tetap mengacu pada standar nasional pendidikan.

Konsep Otonomi Daerah

Konsep berikutnya yang menjadi landasan penelitian ini adalah otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam bidang pendidikan, otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan daerah masing-masing. Kewenangan tersebut memungkinkan pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan pendidikan secara lebih adaptif, baik dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, maupun penyediaan berbagai fasilitas pendukung proses pembelajaran.

Supawi dan Haryati (2023) menjelaskan bahwa otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih efektif karena kebijakan dapat dirumuskan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kabupaten Nias, kewenangan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang berbagai strategi peningkatan mutu pendidikan, antara lain melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah, peningkatan akses menuju sekolah, penyediaan

rumah dinas bagi guru di wilayah terpencil, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan manajemen pendidikan. Efektivitas pelaksanaan otonomi daerah dalam sektor pendidikan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang tepat, mengalokasikan sumber daya secara efektif, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pendidikan secara berkelanjutan.

Keempat konsep yang menjadi landasan penelitian ini memiliki keterkaitan erat dalam menjelaskan efektivitas strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o. Teori efektivitas Steers menjadi dasar untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Konsep *good governance* memberikan landasan mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efektif dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Sementara itu, konsep desentralisasi dan otonomi daerah menjelaskan dasar kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kondisi lokal.

Dengan demikian, efektivitas strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias tidak semata-mata ditentukan oleh keberadaan program pembangunan pendidikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip *good governance* ke dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Integrasi tersebut diperlukan agar berbagai kebijakan dan program pendidikan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, sinergi antara efektivitas kebijakan, tata kelola pemerintahan, desentralisasi, dan otonomi daerah diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pendidikan, khususnya di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o, serta menghasilkan peningkatan mutu pendidikan yang nyata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o. Melalui pendekatan kualitatif, fenomena penelitian dideskripsikan secara sistematis, objektif, dan komprehensif ber-

dasarkan data dan informasi yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan strategi pemerintah daerah serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, meliputi jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, dan sumber ilmiah lainnya. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas strategi pemerintah daerah, mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan dasar yang sejalan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Strategi tersebut menjadi respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, sulitnya akses menuju sekolah, rendahnya kehadiran guru akibat kondisi geografis, serta keterlambatan distribusi bahan ajar. Persoalan tersebut sempat menjadi perhatian publik setelah kondisi SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o diberitakan secara luas pada awal 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan pendidikan di wilayah terpencil tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran, tetapi juga dipengaruhi oleh infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas Richard M. Steers, strategi Pemerintah Kabupaten Nias dapat dinilai cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Efektivitas organisasi menurut Steers dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, dan karakteristik individu. Dalam penelitian ini, karakteristik organisasi ter-

cermin dalam kemampuan Pemerintah Kabupaten Nias dan Dinas Pendidikan menyusun kebijakan, membangun koordinasi lintas sektor, serta mengalokasikan sumber daya untuk menangani persoalan pendidikan. Setelah munculnya permasalahan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan pendidikan dan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik. Respons tersebut menunjukkan kapasitas pemerintah dalam menangani persoalan secara cepat agar pelayanan pendidikan tetap berlangsung.

Salah satu strategi utama pemerintah daerah ialah meningkatkan disiplin dan pengawasan terhadap tenaga pendidik. Persoalan ketidakhadiran guru menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem pengawasan pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan, pemerintah melakukan pembinaan guru, meningkatkan pemantauan kehadiran, serta menyediakan rumah dinas agar tenaga pendidik dapat tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi kendala jarak dan waktu tempuh dari tempat tinggal menuju sekolah. Dengan meningkatnya kehadiran guru, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih konsisten sehingga peserta didik memperoleh hak belajar sesuai jadwal yang ditetapkan. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sari dan Prasetyo (2024) yang menjelaskan bahwa pengawasan kinerja dan peningkatan disiplin guru berpengaruh positif terhadap mutu pendidikan, khususnya pada sekolah di daerah terpencil.

Selain penguatan sumber daya manusia, pemerintah daerah melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan. Upaya tersebut mencakup rehabilitasi bangunan sekolah, pembangunan rumah dinas guru, peningkatan akses jalan, serta perbaikan jembatan yang menjadi kendala mobilitas guru dan peserta didik. Pemerintah Kabupaten Nias bersama pemerintah pusat melakukan koordinasi untuk mempercepat pembangunan fasilitas tersebut setelah kondisi sekolah mendapat perhatian secara luas. Pembangunan rumah dinas guru menjadi langkah strategis untuk mengurangi keterlambatan dan ketidakhadiran guru akibat jauhnya lokasi tempat tinggal. Sementara itu, perbaikan jalan dan jembatan mendukung distribusi buku pelajaran, media pembelajaran, dan kebutuhan pendidikan lainnya. Rahmawati dan Hidayat (2025) menyatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana memiliki hubungan erat dengan efektivitas pembelajaran karena lingkungan belajar

yang memadai dapat meningkatkan motivasi guru dan peserta didik.

Ditinjau dari konsep *good governance*, strategi Pemerintah Kabupaten Nias memperlihatkan penerapan prinsip responsivitas, akuntabilitas, dan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah daerah melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi sekolah. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya ditunjukkan melalui perumusan kebijakan, tetapi juga melalui kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Prinsip tersebut juga tercermin dalam keterlibatan Dinas Pendidikan, pemerintah desa, pemerintah pusat, dan masyarakat sekitar sekolah. Kolaborasi antarpihak menjadi unsur penting dalam mempercepat pelaksanaan program pembangunan pendidikan di wilayah terpencil.

Efektivitas, Hambatan, dan Dampak Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias

Meskipun berbagai strategi telah menghasilkan perkembangan positif, implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan utama berkaitan dengan karakteristik lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam teori efektivitas Steers. Kondisi geografis Kabupaten Nias yang didominasi wilayah perbukitan dan desa-desa terpencil menyebabkan akses menuju SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o masih relatif sulit. Pada beberapa titik, jalan yang rusak menghambat mobilitas guru dan distribusi bahan pembelajaran, sedangkan kondisi jembatan yang belum sepenuhnya aman menimbulkan risiko bagi keselamatan warga sekolah. Kendala geografis tersebut tidak hanya memengaruhi proses pembelajaran, tetapi juga membatasi efektivitas pengawasan Dinas Pendidikan karena lokasi sekolah relatif sulit dijangkau.

Hambatan lainnya berkaitan dengan karakteristik individu, terutama kesiapan dan komitmen tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas di wilayah terpencil. Meskipun pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan, penempatan guru di wilayah dengan akses terbatas tetap menjadi tantangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak cukup mengandalkan kebijakan administratif, tetapi juga membutuhkan dukungan terhadap kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan tenaga pendidik. Dalam konteks tersebut, pembangunan rumah dinas guru menjadi salah satu kebijakan strategis

yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kedisiplinan guru dalam memberikan layanan pendidikan.

Sebagai upaya optimalisasi, Pemerintah Kabupaten Nias terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan. Pemerintah daerah juga meningkatkan kualitas manajemen pendidikan melalui evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program, pembinaan tenaga pendidik, dan penguatan sistem pengawasan sekolah. Pembangunan rumah dinas guru menjadi salah satu program prioritas karena dipandang dapat mengatasi persoalan mendasar yang berkontribusi terhadap rendahnya kehadiran guru. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada aspek pendukung yang menentukan keberlangsungan proses pembelajaran.

Strategi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Nias memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o. Dampak tersebut antara lain terlihat pada peningkatan kualitas proses pembelajaran. Perbaikan fasilitas, ketersediaan media pembelajaran yang lebih memadai, dan meningkatnya kehadiran guru memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung lebih teratur. Guru memiliki ruang yang lebih besar untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara lebih optimal. Program peningkatan kompetensi guru yang diselenggarakan pemerintah daerah juga mendukung penguatan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Maulidia dan Mudlofir (2025) menjelaskan bahwa kompetensi guru merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan peningkatan mutu pendidikan dasar karena guru merupakan pelaksana utama proses pembelajaran.

Dampak berikutnya terlihat pada meningkatnya motivasi belajar peserta didik. Lingkungan sekolah yang lebih layak, pembelajaran yang berlangsung secara rutin, dan penggunaan metode yang lebih beragam mendorong peserta didik lebih aktif mengikuti kegiatan belajar. Kehadiran guru yang lebih konsisten memberikan kepastian dalam memperoleh layanan pendidikan, sekaligus meningkatkan partisipasi peserta didik dan memperkuat interaksi antara guru dan peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan kemam-

puan akademik dan pembentukan karakter peserta didik.

Strategi pemerintah daerah juga memberikan dampak terhadap hasil belajar peserta didik. Meskipun peningkatan hasil belajar membutuhkan proses yang relatif panjang, berbagai kebijakan yang diterapkan telah menciptakan kondisi yang lebih mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas guru, serta ketersediaan bahan ajar yang lebih memadai memberikan peluang kepada peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik. Apriliani et al. (2024) menyatakan bahwa dukungan pembiayaan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan sekolah secara memadai berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan hasil belajar karena proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif.

Selain proses pembelajaran dan hasil belajar, strategi Pemerintah Kabupaten Nias turut memengaruhi tata kelola sekolah. Dukungan melalui pembinaan, pemantauan, dan evaluasi secara berkala mendorong sekolah meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan tenaga pendidik, mengelola sarana dan prasarana, serta memastikan seluruh kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan fasilitas fisik, tetapi juga oleh kualitas manajemen sekolah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan.

Secara keseluruhan, strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o dapat dinilai cukup efektif apabila ditinjau berdasarkan teori efektivitas Steers serta konsep *good governance*, desentralisasi, dan otonomi daerah. Berbagai kebijakan yang diterapkan telah memberikan perubahan positif dalam pengelolaan tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran, motivasi belajar peserta didik, hasil belajar, dan tata kelola sekolah. Namun, efektivitas tersebut masih perlu diperkuat melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pemerataan distribusi guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, serta evaluasi program secara berkelanjutan. Optimalisasi berbagai aspek tersebut diharapkan dapat mendukung pemerataan mutu pendidikan secara

berkelanjutan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik. Efektivitas tersebut tercermin melalui berbagai program yang meliputi peningkatan kompetensi dan pengawasan guru, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan rumah dinas guru, serta penguatan manajemen sekolah. Berbagai kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap kualitas proses pembelajaran, peningkatan motivasi dan hasil belajar peserta didik, serta perbaikan tata kelola sekolah. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama kondisi geografis yang sulit, keterbatasan infrastruktur jalan dan jembatan, serta distribusi tenaga pendidik dan bahan pembelajaran yang belum optimal.

Untuk meningkatkan efektivitas strategi tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias perlu terus mengoptimalkan kebijakan peningkatan mutu pendidikan melalui percepatan pembangunan infrastruktur menuju sekolah dan penyediaan sarana serta prasarana pendidikan yang memadai. Upaya tersebut perlu disertai dengan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, termasuk penyediaan rumah dinas bagi tenaga pendidik yang bertugas di daerah terpencil. Selain itu, koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat perlu terus diperkuat, disertai dengan pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan tepat sasaran. Langkah-langkah tersebut penting untuk mendukung pemerataan layanan pendidikan sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri 078481 Uluna'i Hiligo'o secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Aini, M. 2022, 'Desentralisasi pendidikan madrasah melalui otonomi daerah di Indonesia', *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(1), pp. 95–106. Available at: <https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama-islam/article/view/1122>.
- Antara Sumut, 2025, 'Pemerintah pusat benahi fasilitas SDN yang viral di Nias'. Available at: <https://sumut.antaranews.com>.
- Apriliani, A., Muzan, M., Jamrizal, J. and Ansori, A. 2024, 'Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan mutu standar pembiayaan pendidikan Provinsi Jambi', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), pp. 41634–41640. Available at: <https://iptam.org/index.php/iptam/article/view/20184>.
- Fokuslensa, 2025a, 'Kadis Pendidikan Kab. Nias programkan pembangunan di SDN 078481 Uluna'ai Hiligo'o'. Available at: <https://www.fokuslensa.com>.
- Fokuslensa, 2025b, 'Bupati Nias hadir serah terima mess guru SD Negeri 078481 Uluna'ai Hiligo'o'. Available at: <https://www.fokuslensa.com>.
- Gibson, J.L., Ivancevich, J.M., Donnelly, J.H. and Konopaske, R. 2012, *Organizations: Behavior, structure, processes*. New York: McGraw-Hill.
- Kompas, 2025, 'Guru SD di Nias tak mengajar sebulan, Disdik wajibkan tinggal dekat sekolah'. Available at: <https://medan.kompas.com>.
- Mahmudi, 2015, *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maulidia, M. and Mudlofir, A. 2025, 'Analisis kebijakan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia', *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Available at: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/34497>.
- Pemerintah Kabupaten Nias, 2025, 'Rapat koordinasi rencana tindak lanjut berita viral SDN 078481 Uluna'ai Hiligo'o Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias'. Available at: <https://niaskab.go.id>.
- Rahmawati, D. and Hidayat, R. 2025, 'Pengaruh sarana dan prasarana terhadap peningkatan mutu pendidikan dasar di wilayah 3T', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 12(1), pp. 33–45.
- Ramadani, A. and Putri, R.P. 2024, 'Implementasi kebijakan peningkatan pemerataan mutu pendidikan daerah 3T Pemerintah Kota Batam', *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 10(1). Available at:

<https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/13523>.

- Saputri, N., Prianti, D., Priandana, N.G. *et al.* 2025, 'Implementasi *good governance* sebagai upaya penguatan otonomi daerah di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*. Available at: <https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1787>.
- Sari, N. and Prasetyo, A. 2024, 'Strategi penguatan kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil', *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 16(2), pp. 145–156.
- Supawi, S. and Haryati, T. 2023, 'Manajemen mutu pendidikan di era otonomi daerah', *Jurnal Pendidikan Terintegrasi*. Available at: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpt/article/view/23781>.
- Wulandari, E., Qolby, H.R., Devi, I.S. and Azis, A. 2025, 'Peran otonomi daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui desentralisasi', *Akhlak: Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*. Available at: <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Akhlak/article/view/900>.